

---

## ANALISIS KEBIJAKAN PARIWISATA DI KABUPATEN SAMOSIR MENGUNAKAN EXPERT CHOICE

**Nonik Kusuma Wardhani<sup>1</sup>; Leviana Nur Rochmah<sup>2</sup>; Dina Maulidah<sup>3</sup>; Claudia Marta Sirait<sup>4</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Diponegoro; <sup>2</sup>Universitas Diponegoro; <sup>3</sup>Universitas Diponegoro; <sup>4</sup>Universitas  
Diponegoro

[1nonikkusumawardhani@students.undip.ac.id](mailto:1nonikkusumawardhani@students.undip.ac.id); [2leviananurrochmah@students.undip.ac.id](mailto:2leviananurrochmah@students.undip.ac.id);  
[3dinamaulidah@students.undip.ac.id](mailto:3dinamaulidah@students.undip.ac.id); [4claudiamartasirait@students.undip.ac.id](mailto:4claudiamartasirait@students.undip.ac.id)

---

### ABSTRAK

*Kebijakan pariwisata dibuat sebagai usaha memberikan kepastian pada wisatawan dan masyarakat terkait dengan pengembangan pariwisata, sehingga dapat memaksimalkan manfaat pariwisata kepada pemangku kepentingan dan meminimalkan efek negatif, biaya, dan dampak lainnya yang terkait. Tujuan penelitian ini berfokus untuk menganalisis evaluasi input mengingat aspek input menjadi kunci keberhasilan sebuah kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengembangan pariwisata tidak dapat dilepaskan dari dukungan masukan kebijakan berupa sumber daya manusia, sarana dan prasarana, rencana strategi pengembangan pariwisata serta dukungan anggaran. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah mix method dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP). AHP (Analytical Hierarchy Process) sendiri merupakan salah satu pendekatan dalam sistem pengambilan keputusan yang menggunakan beberapa variabel dengan proses analisis bertingkat.*

**Kata Kunci:** *Evaluasi, Pengembangan Pariwisata, Kebijakan, AHP (Analytical Hierarchy Process)*

---

### ANALYSIS OF TOURISM POLICY IN SAMOSIR DISTRICT USING EXPERT CHOICE

#### ABSTRACT

*Tourism policy is created as an effort to provide certainty to tourists and the community regarding tourism development, so that it can maximize the benefits of tourism to stakeholders and minimize negative effects, costs and other related impacts. The aim of this research focuses on analyzing input evaluation considering that the input aspect is the key to the success of a policy. The research results show that tourism development policy cannot be separated from the support of policy input in the form of human resources, facilities and infrastructure, tourism development strategic plans and budget support. The method used in the research is a mix method and the approach used in this research is the Analytical Hierarchy Process (AHP) approach. AHP (Analytical Hierarchy Process) itself is an approach to a decision making system using several variables with a multilevel analysis process.*

**Keywords:** *Evaluation, Tourism Development, Policy, AHP (Analytical Hierarchy Process)*

---

## PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir telah memilih beberapa destinasi pariwisata yang harus dikembangkan untuk salah satunya yakni wisata Danau Toba yang akan diwujudkan sebagai destinasi pariwisata internasional atau Monaco Asia. Menurut Undang-Undang RI nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Selaras dengan hal tersebut, wisata Danau Toba juga terbentuk dari interaksi banyak orang yang meliputi, pemerintah, masyarakat, wisatawan, kelompok organisasi dan kelompok bisnis yang menjadi sebuah sistem dalam kegiatan pembangunan daerah dan memberikan kontribusi pada bagian kebijakan di Daerah Kabupaten Samosir.

Jumlah wisatawan ke Danau Toba di Sumatera Utara pada tahun 2020 menurun drastis dibandingkan periode yang sama tahun 2019 menurut Badan Pusat Statistik (BPS). Pada bulan November 2020, terdapat 1.366 kunjungan wisatawan dari 22.128 sebelumnya. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 93,83%, dan tingkat hunian kamar hotel berbintang hanya terisi sekitar 34,41% pada bulan yang sama. Dengan demikian, untuk mencapai tujuan pembangunan pariwisata Danau Toba secara efektif dan efisien, salah satu kebijakan dan program kerja yang harus segera diterapkan adalah pengembangan

destinasi objek wisata yang ada di Kabupaten Samosir. Pengembangan destinasi pariwisata di Kabupaten Samosir telah diatur dalam Surat Keputusan Bupati Samosir Provinsi Sumatera Utara Nomor 474 Tahun 2017 Tentang Penetapan Kriteria dan Klasifikasi Objek Wisata di Kabupaten Samosir. Kebijakan ini bertujuan untuk mengembangkan destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten Samosir dengan melakukan pengelompokan melalui penetapan kriteria dan klasifikasi objek wisata yang telah ditentukan dalam kebijakan ini. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 juga Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021.

Beberapa masalah yang menghambat pelaksanaan kebijakan pariwisata Kabupaten Samosir, salah satu kendala yang dihadapi oleh pemerintah yaitu sulitnya masyarakat untuk melepaskan tanahnya dalam pengembangan objek wisata karena masyarakat beranggapan bahwa ini adalah tanah adat. Maka, pemerintah harus berupaya melakukan pendekatan secara kekeluargaan untuk meyakini masyarakat bahwa dengan melakukan pengembangan wisata di Samosir maka masyarakat dapat merasakan kemakmuran dan kesejahteraan di Kabupaten Samosir. Dalam

pengembangan objek wisata ini yang sangat perlu dibenahi adalah sarana dan prasarana yang mendukung unsur yang lain yaitu promosi, pengembangan daya tarik, pelaksanaan event untuk menarik minat dan antusias masyarakat. Selain itu tujuan dari surat keputusan Bupati terkait kebijakan pariwisatanya yakni untuk mencapai pertumbuhan pariwisata yang berkelanjutan, memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak yang terlibat, dan mempromosikan pembangunan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Samosir.

Analisis tentang kebijakan pariwisata harus dilakukan untuk mendukung pembangunan pariwisata Danau Toba melalui pengelolaan objek wisata yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan wisatawan dan membantu optimalisasi pengembangan pariwisata Kabupaten Samosir. Tujuan pembahasan masalah tentang kebijakan pariwisata terhadap pengelolaan objek wisata di Kabupaten Samosir, sangatlah penting dilakukan sebab terkait kebijakan pemerintah tentang program pembangunan nasional di Indonesia bahwa pengembangan pariwisata merupakan sektor unggulan dan menjadi kunci pembangunan.

Berdasarkan latar belakang diatas, juga dapat ditemukan masalah yang terkait dengan penentuan pengembangan dan pengelolaan objek wisata yang akan kembangkan di Kabupaten Samosir, dilihat dari: (a) Partisipasi Masyarakat, (b) Sarana Prasarana, (c) Promosi Pariwisata, (d) Tantangan dalam Pariwisata di Kabupaten Samosir. Untuk itu, artikel ini

berjudul: "Analisis Kebijakan Pariwisata Di Kabupaten Samosir Menggunakan Expert Choice".

## METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode mixed methods. Penelitian ini merupakan suatu langkah penelitian dengan menggabungkan dua bentuk penelitian yang telah ada sebelumnya yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2013) ke dua metode tersebut dapat digunakan bersama-sama atau digabungkan, tetapi dengan catatan digunakan bersama untuk meneliti pada obyek yang sarna, tetapi tujuan yang berbeda. Metode kualitatif digunakan untuk menemukan hipotesis, sedangkan metode kuantitatif digunakan untuk menguji hipotesis.

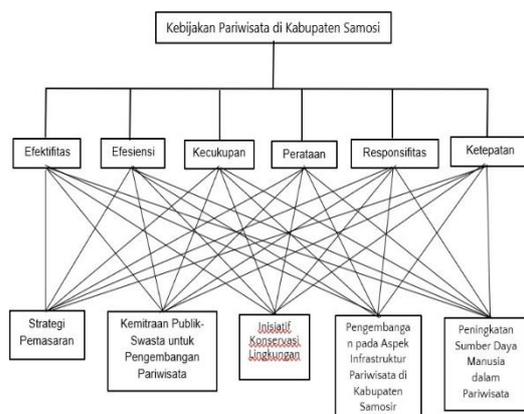
Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan *Analytical Hierarchy Process* (AHP). AHP (*Analytical Hierarchy Process*) sendiri merupakan salah satu pendekatan dalam sistem pengambilan keputusan yang menggunakan beberapa variabel dengan proses analisis bertingkat. Analisis dilakukan dengan memberi nilai prioritas dari tiap-tiap variabel, kemudian melakukan perbandingan berpasangan dari variabel-variabel dan alternatif-alternatif yang ada (Saaty, 1993).

Menurut Suryadi dan Ramdhani (2000), AHP (*Analytical Hierarchy Process*) merupakan suatu model pengambilan keputusan yang bersifat komprehensif. AHP mempunyai kemampuan untuk

memecahkan masalah yang multi objektif dan multi kriteria yang berdasar pada perbandingan preferensi dari setiap elemen dalam hirarki. Berikut merupakan Prinsip kerja AHP (*Analytical Hierarchy Process*):

### 1. Penyusunan Hirarki

Yang paling atas merupakan tujuan, yang kedua kriteria dan yang terakhir alternatif, berikut ini gambar penyusunan hirarki:



Gambar 1. Penyusunan Hirarki Kebijakan Pariwisata di Kabupaten Samosir

### 2. Penilaian Kriteria dan Alternatif

Dalam proses ini dilakukan perbandingan berpasangan (*pairwise comparison*) antar berbagai kriteria, dengan dua tahap penting yaitu: (i) menentukan mana diantara dua yang dianggap (penting/disukai/mungkin terjadi) serta; (ii) menentukan seberapa kali lebih (penting/disukai/mungkin terjadi). Prioritas dari sederetan kriteria dan alternatif tersebut ditentukan dengan membandingkan satu sama lain secara berpasangan

yang diberi bobot berupa skala dari 1 s/d 9 dengan definisi masing-masing skala

### 3. Penentuan Prioritas

Nilai-nilai perbandingan relatif kemudian diolah untuk menentukan peringkat alternatif dari seluruh alternatif. Baik kriteria kualitatif, maupun kriteria kuantitatif, dapat dibandingkan sesuai dengan penilaian yang telah ditentukan untuk menghasilkan bobot dan prioritas. Bobot atau prioritas dihitung dengan manipulasi matriks atau melalui penyelesaian persamaan matematik.

Pertimbangan-pertimbangan terhadap perbandingan berpasangan disintesis untuk memperoleh keseluruhan prioritas melalui tahapan- tahapan berikut:

- Kuadratkan matriks hasil perbandingan berpasangan.
- Hitung jumlah nilai dari setiap baris, kemudian lakukan normalisasi matriks.

### 4. Konsistensi Logis

Semua elemen dikelompokkan secara logis dan diperingkatkan secara konsisten sesuai dengan suatu kriteria yang logis

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kriteria Kebijakan

Dalam pengujian alternatif kebijakan, kami menggunakan kriteria-kriteria kebijakan menurut Dunn (2003), yang meliputi 6 (enam) tipe sebagai berikut:

#### 1. Efektifitas

Efektifitas berkaitan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektifitas yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter.

Hasil analisis yang dilakukan peneliti menyarankan langkah-langkah untuk meningkatkan efektifitas kebijakan SK Bupati Kabupaten Samosir Nomor 474 Tahun 2017 tentang Penetapan Kriteria dan Klasifikasi Objek Wisata. Rekomendasi utamanya adalah memperbaiki strategi pemasaran, mengembangkan infrastruktur pariwisata, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor pariwisata. Langkah-langkah ini dirancang untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan lebih efisien, dengan tujuan akhir mencapai pencapaian yang optimal dari program pariwisata Kabupaten Samosir.

#### 2. Efisiensi

Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter.

Efisiensi, yang diukur berdasarkan penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil, merupakan faktor kunci dalam menilai keberhasilan suatu kegiatan. Rekomendasi dari analisis menyarankan peningkatan infrastruktur pariwisata, pendidikan dan pengembangan masyarakat, serta pengelolaan pariwisata. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan peningkatan ekonomi daerah di Kabupaten Samosir melalui strategi alternatif kebijakan pariwisata yang lebih efisien.

#### 3. Kecukupan

Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.

Kecukupan dalam analisis kebijakan menggambarkan kemampuan suatu alternatif

kebijakan atau program untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Analisis menunjukkan bahwa rekomendasi untuk kebijakan SK Bupati Kabupaten Samosir Nomor 474 Tahun 2017 tentang Penetapan Kriteria dan Klasifikasi Objek Wisata di Kabupaten Samosir telah memadai dalam memenuhi kebutuhan yang diidentifikasi.

#### 4. Perataan

Perataan erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.

Perataan dalam konteks ini mengacu pada distribusi yang lebih adil terhadap sumber daya di masyarakat. Rekomendasi seperti peningkatan infrastruktur pariwisata, pendidikan, pengembangan masyarakat, dan pengelolaan pariwisata di Kabupaten Samosir diharapkan dapat meningkatkan daya tarik pariwisata bagi wisatawan. Hal ini diharapkan akan meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata Samosir dengan memastikan bahwa semua objek wisata memiliki kualitas yang tinggi dan menarik bagi pengunjung.

#### 5. Responsivitas

Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai

kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan.

Responsivitas mengacu pada sejauh mana alternatif kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok tertentu. Peningkatan infrastruktur pariwisata, pendidikan, pengembangan masyarakat, dan pengelolaan pariwisata di Kabupaten Samosir diharapkan meningkatkan daya tarik pariwisata bagi wisatawan. Hal ini menjamin bahwa semua objek wisata di Kabupaten Samosir memiliki kualitas tinggi dan daya tarik yang cukup untuk menarik pengunjung, serta memastikan pencapaian yang sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan.

#### 6. Ketepatan

Kriteria ketepatan secara dekat yang berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena pernyataan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satu kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut.

Ketepatan mengacu pada hasil alternatif atau rekomendasi

kebijakan sebagai pilihan yang layak. Peningkatan infrastruktur pariwisata, pendidikan, pengembangan masyarakat, dan pengelolaan pariwisata di Kabupaten Samosir diharapkan meningkatkan daya tarik pariwisata bagi wisatawan. Hal ini menjamin bahwa semua objek wisata di Kabupaten Samosir memiliki kualitas yang canggih dan efektif, serta sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan.

### **Alternatif Kebijakan**

Tujuan dari adanya kebijakan pengelolaan objek wisata di Kabupaten Samosir yaitu untuk mengembangkan strategi yang dapat meningkatkan pengelolaan objek wisata secara berkelanjutan. Melalui kebijakan tersebut, Kabupaten Samosir bertujuan untuk memaksimalkan potensi pariwisata yang dimiliki, sehingga dapat meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, kebijakan tersebut juga diarahkan untuk melestarikan lingkungan alam dan budaya serta meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan yang berkunjung ke daerah tersebut. Untuk itu ada beberapa alternatif kebijakan pengelolaan objek wisata di Kabupaten Samosir yang dapat dilakukan yaitu:

#### **1. Strategi Pemasaran**

Menurut Kotler (1993), tujuan pemasaran adalah

mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dan memenuhi kebutuhan itu dengan baik, sehingga semua produk menjual dirinya sendiri. Proses pemasaran sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sosial, budaya, politik, ekonomi, dan manajerial.

Pemasaran pariwisata menekankan lebih jauh lagi tentang siapa sebenarnya segmen pasar dan bagaimana perilakunya (Damanik, 2006). Penekannya bagaimana mengkomunikasikan kepada pasar bahwa produk yang ditawarkan (tujuan) unggul dan berbeda dengan produk lain. Media promosi konvensional tidak selamanya dapat digunakan untuk produk pariwisata, terlebih produk wisata yang diminati tertentu. Pemasaran pariwisata menurut Holloway & Robinson (1995) terdiri dari 7 P, yaitu product, positioning, price, promotion, place, packaging, partnership.

Membangun strategi pemasaran pariwisata yang terarah, kerjasama dengan agen perjalanan, meningkatkan promosi wisata dan meningkatkan sistem informasi digital, baik secara nasional maupun internasional, promosi melalui duta pariwisata Kabupaten Samosir, pemasangan baliho, serta pelaksanaan event untuk menarik minat dan antusias masyarakat.

#### **2. Kemitraan Publik-Swasta untuk Pengembangan Pariwisata**

Dalam pola kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat bisa melakukan pembagian kerja yang wajar dan saling melengkapi sesuai dengan kapasitas dan fungsinya masing-masing. Pemerintah bisa memusatkan perannya sebagai regulator, fasilitator dan promotor penyelenggaraan pelayanan publik. Sektor swasta dalam menjalankan perannya mempunyai kemampuan dalam merespon terhadap kebutuhan masyarakat secara cepat dan efisien bisa lebih banyak dilibatkan dalam kegiatan operasional terutama dalam produksi dan distribusi pelayanan publik. Untuk pelayanan publik tertentu yang bersifat lokal, unik dan spesifik maka masyarakat akan bisa berperan secara efektif dibandingkan dengan pemerintah dan swasta (Agus Dwiyanto, 1996:17).

Untuk itu dalam melakukan kemitraan strategis dapat dilakukan antara pemerintah daerah dan sektor swasta, termasuk perusahaan pariwisata, hotel, dan restoran. Agar dapat menggerakkan investasi besar dalam pengembangan infrastruktur dan fasilitas pariwisata.

### **3. Inisiatif Konservasi Lingkungan**

Konservasi sumber daya alam hayati bertujuan untuk mewujudkan kelestarian sumber

daya alam hayati beserta ekosistemnya agar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia. Konsep konservasi dikemukakan oleh Theodore Roosevelt (1902).

Di Indonesia konservasi sumber daya alam mulai diperhatikan pada tahun 1970-an dan mulai berkembang. Tujuan pelaksanaan konservasi ialah sebagai penyangga kehidupan dengan memelihara proses ekologi yang penting, melestarikan jenis dan ekosistem serta menjamin keanekaragaman genetik. Kawasan konservasi berperan dalam pembangunan meliputi keseimbangan lingkungan alam; manfaat bagi manusia; pengembangan ilmu pendidikan; pendukung pembangunan bidang pertanian; pengembangan kepariwisataan dan peningkatan devisa; penyelamat usaha pembangunan dan hasil dari pembangunan (Christanto, 2014).

Inisiatif konversi lingkungan dalam hal ini dapat termasuk pemulihan ekosistem alam, pengelolaan sampah yang berkelanjutan, dan penanaman pohon, dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat lokal dan organisasi lingkungan.

### **4. Pengembangan pada Aspek Infrastruktur Pariwisata di Kabupaten Samosir**

Peran infrastruktur tidak hanya berpengaruh pada pengembangan wilayah, tetapi juga pada bidang kepariwisataan. Sebagai contohnya bahwa jalan, pelabuhan udara, pelabuhan laut dan tempat penginapan dapat melancarkan akses masuk wisatawan ketempat wisata. Dan juga sebagai mediator untuk ekonomi masyarakat yang tinggal disekitar wisata tersebut. Infrastruktur berperan sangat penting dalam mendorong kualitas wisatawan itu sendiri serta pada lingkungan sekitarnya (Afandi, 2013. Dalam Sinaga, Arsitektur, Magister, & Pembangunan, 2013).

Pengembangan pada aspek infrastruktur pariwisata seperti jalan, transportasi publik, fasilitas, dan aksesibilitas untuk memastikan pengalaman yang nyaman bagi wisatawan.

## 5. Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam Pariwisata

SDM merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam memajukan sektor pariwisata. Pentingnya SDM di sektor pariwisata adalah manusia (*people*) merupakan sumber daya yang sangat penting di sebagian besar organisasi. Khususnya di organisasi berbasis jasa (*service-based organization*), SDM berperan sebagai faktor kunci dalam mewujudkan keberhasilan

kinerja (Evans, Campbell, & Stonehouse, 2003).

Dengan melakukan prnggelaran program pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk tenaga kerja pariwisata, termasuk pelatihan dalam layanan pelanggan, kebersihan, pemandu wisata, dan manajemen destinasi, guna meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman wisatawan secara keseluruhan.

## Hasil Perhitungan Menggunakan Metode AHP pada Aplikasi Expert Choice

Setelah mempertimbangkan beberapa aspek urgensitas masalah pada pendahuluan, kami telah mempertimbangkan nilai dari setiap kriteria dan alternatif kebijakan yang digunakan. Berikut merupakan hasil dari perhitungan menggunakan Metode AHP pada Aplikasi Expert Choice:

Kriteria	Nilai
Efektivitas	0,250
Efisiensi	0,192
Kecepatan	0,178
Perilaku	0,123
Responsifitas	0,189

Kriteria	Nilai
Strategi Pemasaran	0,352
Komtribusi Publik Swast	0,177
Kualitas Konvensional Lis	0,185
Pengembangan Produk	0,186
Peningkatan Sumber C	0,179

Gambar 2. Hasil perhitungan menggunakan metode AHP pada Aplikasi Expert Choice

Dari hasil dari perhitungan kriteria (bagian kiri) tersebut, diperoleh nilai yang paling tinggi adalah kriteria "Efektivitas" dengan nilai 0,250, hal ini selaras dengan

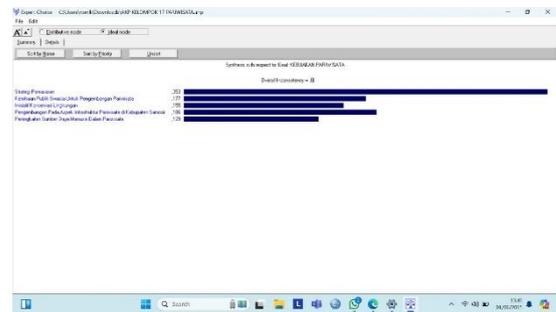
“goal” atau tujuan yaitu terkait tercapainya hasil yang diinginkan. Dimana, pariwisata di Kabupaten Samosir berpedoman pada Surat Keputusan Bupati Samosir Nomor 474 Tahun 2017 tentang Penetapan Kriteria dan Klasifikasi Objek Wisata di Kabupaten Samosir tersebut, bertujuan untuk mempercepat pembangunan pariwisata di Kabupaten Samosir, yang merupakan sektor unggulan dan kunci pembangunan di Indonesia.

Dengan adanya kriteria dan klasifikasi objek wisata yang telah ditetapkan, semua kelompok dapat lebih mudah membantu dan mempercepat pengelolaan objek wisata di Kabupaten Samosir dan pembangunan pariwisata di Kabupaten Samosir.

Sedangkan, untuk hasil *alternatif ideal mode* (bagian kanan), diperoleh hasil yang paling tinggi adalah dari alternatif kebijakan “Strategi Pemasaran” dengan nilai 0,353. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh adanya urgensi masalah sosial masyarakat yang kurang memahami terkait pengelolaan pariwisata lokal dan lemahnya strategi pemasaran atau promosi secara masif dari penduduk aslinya sendiri.

Dari alternatif tersebut diharapkan dapat membangun strategi pemasaran pariwisata yang terarah, kerjasama dengan agen perjalanan, meningkatkan promosi wisata dan meningkatkan sistem informasi digital, baik secara nasional maupun internasional, promosi melalui duta pariwisata Kabupaten Samosir, pemasangan baliho, serta pelaksanaan

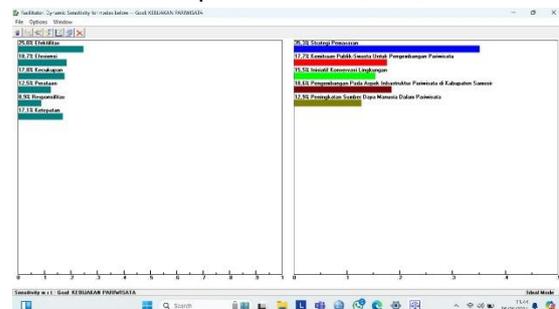
event untuk menarik minat dan antusias masyarakat.



Gambar 3. Overall Inconsistency

Dalam hasil perhitungan juga diperoleh hasil *Overall Inconsistency* sebesar 0,01. Hal tersebut menunjukkan bahwa dari keseluruhan nilai untuk perhitungan yang digunakan telah konsisten dan menunjukkan hasil yang ideal (mengikuti saran). Sehingga, dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang ideal, yaitu dengan urutan:

1. Strategi Pemasaran (0,353)
2. Pengembangan pada aspek infrastruktur pariwisata di Kabupaten Samosir (0,186)
3. Kemitraan publik swasta untuk pengembangan pariwisata (0,177)
4. Inisiatif konservasi lingkungan (0,155)
5. Peningkatan sumber daya manusia dalam pariwisata (0,129)



Gambar 4. Grafik: Dynamic Sensitivity

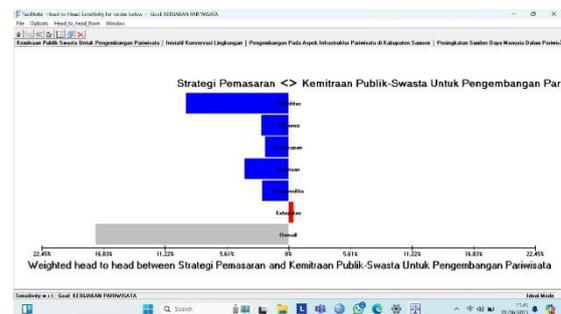
Grafik tersebut menunjukkan seberapa dinamis sensitivitas dari berbagai alternatif kebijakan pariwisata di Kabupaten Samosir, dimana sumbu horizontal menampilkan tingkat sensitivitas dari setiap alternatif kebijakan. Angka persentase menunjukkan kontribusi relatif dari masing-masing kriteria dan alternatif terhadap tujuan keseluruhan sesuai dengan besaran sensitivitasnya. Hal tersebut juga memberikan seberapa besar kontribusi setiap alternatif dalam mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan.

Dalam diagram tersebut tingkat sensitivitas dari setiap kriteria yang memiliki nilai tertinggi yaitu Efektivitas dengan kontribusi tertinggi sebesar 25,0%, berikut merupakan urutan dari tingkat sensitivitas yang paling tinggi ke rendah yaitu:

1. Efektivitas (25,0%)
2. Efisiensi (18,7%)
3. Kecukupan (17,8%)
4. Ketepatan (17,1%)
5. Perataan (12,5%)
6. Responsivitas (8,9%)

Sedangkan, dalam diagram tersebut tingkat sensitivitas dari setiap alternatif kebijakan yang memiliki nilai tertinggi yaitu Strategi Pemasaran dengan kontribusi tertinggi sebesar 35,3%. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin besar tingkat sensitivitas dari suatu kriteria dan alternatif kebijakan akan semakin besar pula tingkat kontribusi yang mempengaruhi hasil sebuah rekomendasi kebijakan. Dalam arti lain, tingkat sensitivitas kriteria Efektivitas dan

alternatif kebijakan Strategi Pemasaran memiliki kontribusi yang paling besar.

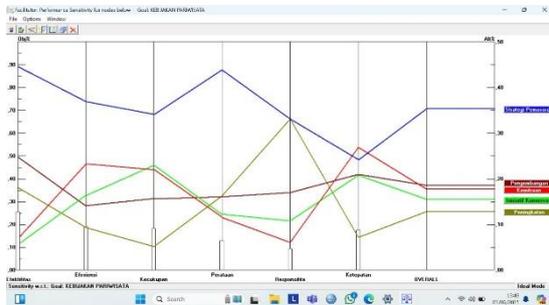


Gambar 5. Grafik: *Head-to-Head Sensitivity*

Grafik tersebut menunjukkan perbandingan langsung sensitivitas antara dua alternatif kebijakan, yaitu Strategi Pemasaran dengan Kemitraan Publik-Swasta Untuk Pengembangan Pariwisata. Sumbu horizontal menunjukkan "Weighted" berat skor sensitivitas secara langsung untuk kriteria Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Ketepatan, Perataan, dan Responsivitas. Bar berwarna dalam grafik menunjukkan skor untuk masing-masing kriteria dan total skor keseluruhan. Perbandingan ini memungkinkan kita untuk melihat mana dari kedua alternatif kebijakan yang lebih unggul berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

Sebagai contoh, dalam perbandingan alternatif kebijakan dari Strategi Pemasaran dan Kemitraan Publik-Swasta jika diukur melalui kriteria Efektivitas, maka lebih unggul Strategi Pemasaran yang mencapai lebih dari 5%, sedangkan jika diukur melalui kriteria Ketepatan maka Kebijakan Kemitraan Publik-Swasta yang lebih unggul mencapai nilai lebih dari 1%. Namun dari

pengukuran keseluruhan kriteria (*overall*) alternatif kebijakan Strategi Pemasaran lebih unggul mencapai lebih dari 16,83%.



Gambar 6. Grafik: *Performance Sensitivity*

Grafik tersebut menunjukkan seberapa sensitif kinerja berbagai alternatif kebijakan terhadap kriteria evaluasi tertentu. Sumbu vertikal (Alt%) menunjukkan tingkat kontribusi atau sensitivitas dari setiap alternatif kebijakan. Sumbu horizontal mewakili berbagai kriteria evaluasi seperti Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Ketepatan, Perataan, dan Responsivitas dan secara keseluruhan (Overall).

Setiap garis-garis berwarna merepresentasikan berbagai alternatif kebijakan seperti Strategi Pemasaran, Pengembangan pada aspek infrastruktur pariwisata di Kabupaten Samosir, Kemitraan publik swasta untuk pengembangan pariwisata, Inisiatif konservasi lingkungan, dan Peningkatan sumber daya manusia dalam pariwisata.

Grafik tersebut membantu untuk memahami bagaimana masing-masing alternatif kebijakan mempengaruhi setiap kriteria evaluasi, sehingga kita dapat melihat kekuatan dan kelemahan relatif dari setiap kebijakan. Sebagai contoh jika ditinjau dari kriteria Efektivitas, Efisiensi,

Kecukupan, Perataan, dan Overall, kebijakan yang paling tepat digunakan adalah Strategi Pemasaran (warna biru).

Namun jika ditinjau dari kriteria Responsivitas alternatif kebijakan yang dapat digunakan ada dua, yaitu kebijakan Strategi Pemasaran (warna biru) dan Peningkatan sumber daya manusia dalam pariwisata (hijau gelap). Hal tersebut juga dipengaruhi oleh keperluan peningkatan responsivitas masyarakat lokal dalam meningkatkan strategi pemasaran dengan melibatkan SDM lokal di Kabupaten Samosir sehingga dapat memaksimalkan kinerja pegawai atau mengurangi tingkat pengangguran di sana.

Sedangkan jika ditinjau menggunakan kriteria Ketepatan, maka alternatif kebijakan yang disarankan adalah Kemitraan publik swasta untuk pengembangan pariwisata (warna merah terang). Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya urgensi Ketepatan dalam pengembangan pariwisata tepatnya dibantu dengan adanya kemitraan, sehingga dapat mempercepat perkembangan pariwisata secara berkelanjutan.

## SIMPULAN

Kebijakan pariwisata di Kabupaten Samosir, khususnya terkait pengembangan objek wisata Danau Toba, memiliki tujuan utama untuk mempercepat pertumbuhan sektor pariwisata sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Dalam implementasinya, Kabupaten Samosir menghadapi beberapa tantangan seperti partisipasi

masyarakat, sarana prasarana yang memadai, promosi yang efektif, dan permasalahan terkait penataan tanah adat. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah daerah telah merumuskan kebijakan yang terstruktur, seperti yang tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Samosir Nomor 474 Tahun 2017. Kebijakan ini mengarah pada klasifikasi objek wisata dan strategi pengembangan yang didukung oleh berbagai regulasi nasional dan lokal terkait pariwisata.

Melalui metode Analisis Hirarki Proses (AHP), kebijakan ini dievaluasi dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria penting seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Dari hasil evaluasi, strategi pemasaran muncul sebagai alternatif terunggul dengan nilai kontribusi tertinggi, yang menunjukkan urgensi untuk meningkatkan promosi pariwisata Samosir baik secara nasional maupun internasional. Selain itu, pengembangan infrastruktur pariwisata, kemitraan publik-swasta, inisiatif konservasi lingkungan, dan peningkatan sumber daya manusia juga menjadi bagian integral dari strategi untuk memaksimalkan potensi pariwisata lokal.

Secara keseluruhan, kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan pengelolaan objek wisata yang berkelanjutan, menjaga kelestarian lingkungan dan budaya lokal, serta meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan. Dengan demikian, implementasi kebijakan pariwisata di Kabupaten Samosir diharapkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi

masyarakat setempat sambil menjaga keberlanjutan sektor pariwisata di masa yang akan datang.

Dengan demikian, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa strategi pemasaran pariwisata yang terarah dan efektif, serta komitmen dan kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat lokal, sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kebijakan pariwisata di Kabupaten Samosir.

## REFERENSI

- Christanto, J. (2014). Ruang Lingkup Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. *Konservasi Sumber Daya ALam*, 3.
- detik. (2021). Wisatawan Danau Toba Turun Drastis hingga 93,83%, Ini Kata Ketua MPR. *Source: <https://news.detik.com/berita/d-5517691/wisatawan-danau-toba-turun-drastis-hingga-93-83-ini-kata-ketua-mpr>*
- Herynda, V. M., & Sumarsono, H. (2022). strategi pengembangan obyek wisata air terjun "Putuk Truno" di kabupaten Pasuruan dengan menggunakan metode analytical hierarki process. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Pendidikan (JEBP)*, 2(4), 465-476.
- Imron, I. (2019). Penerapan Metode AHP pada Penentuan Sales Terbaik Studi Kasus: PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia. *Jurnal Teknik Komputer AMIK BSI*, 5(1), 127-134.
- Lismana, J., Irwansyah, I., & Jiurhadi, J. (2023). Analisis Kebijakan Program

- Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Penajam Paser Utara. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 6(2), 2201-2211.
- Mohammad, F.A. (2019). Konsep dan Strategi Pemasaran Pariwisata. Source: <https://kmc.tp.ugm.ac.id/kms/konsep-dan-strategi-pemasaran-pariwisata/>
- Paendong, F. E. P., Manoppo, F. J., & Rondonuwu, S. G. (2024). Analisis Prioritas Penanganan Longsor Lereng Bawah Dengan Metode Analytic Hierarchy Process (Studi Kasus: Proyek Jalan Nasional Ruas Tomata Beteleme Bpjn Sulawesi Tengah). *Syntax Idea*, 6(6), 2550-2560.
- Sagala, T. D. R. (2023). Implementasi Kebijakan Pengelompokan dan Pengembangan Objek Wisata di Kabupaten Samosir.
- Salenussa, C. (2019). Kajian Kecukupan Infrastruktur Pendukung Pariwisata Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Doctoral dissertation, UAJY).
- Saputra, A., & Ali, K. (2020). Analisis Kebijakan Pariwisata Terhadap Pengelolaan Objek Wisata Di Kabupaten Samosir. *Warta Dharmawangsa*, 14(4), 564-584.
- Setiawan, R. I. (2016). Pengembangan sumber daya manusia di bidang pariwisata: perspektif potensi wisata daerah berkembang. *Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (PENATARAN)*, 1(1), 23-35.
- Wahyuni, REAE (2017). Sinergi kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pengembangan wisata pedesaan Tanjung di Kabupaten Sleman. *PARADIGMA: Jurnal Ilmu Administrasi*, 3 (1), 69-104.
- Yuliani, U. (2021). Penentuan Prioritas Infrastruktur Jalan Dengan Metode Analytic Hierarchy Process (AHP) Expert Choice Studi Kasus: Jalan Raya Demak-Godong. *Jurnal Ilmiah Desain & Konstruksi*, 19(2), 132-141.